



# SITUASI HAM PAPUA 2010

---

Disampaikan oleh Poengky Indarti

**IMPARSIAL**

**Kerjasama**

**PP OTODA FHUB, PP HAM FHUB, LBH SURABAYA POS Malang,  
IMPARSIAL**

**Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Lt VI 2010**



# Gambaran Umum

---

- Jakarta masih menganggap ada gangguan keamanan di Papua, terkait kelompok perlawanan Papua → deployment aparat kepolisian (Brimob, Densus 88), pasukan militer dan intelejen, khususnya di daerah perbatasan dan di pegunungan (Timika, Puncak Jaya dan Wamena) → banyak terjadi pelanggaran HAM
- Perhatian internasional kepada Papua meningkat pasca damai Aceh dan tersebarluasnya aksi kekerasan aparat melalui youtube.



# Gambaran Umum

---

- Isolasi Papua bagi orang asing → surat jalan untuk orang asing yang berkunjung ke Papua
- Pemerintah mulai meningkatkan konsentrasi untuk investasi di Papua → transmigran, pembangunan kota tak terarah, tanpa konsultasi, meminggirkan orang asli.
- Korupsi masif dari tingkat desa hingga pimpinan daerah, tetapi sangat sedikit yang diproses hukum.



# Gambaran Umum

---

- Kebijakan pembangunan Papua tidak jelas.
- Kemiskinan vis a vis eksploitasi kekayaan alam Papua
- Kepercayaan Papua terhadap Jakarta menurun, terlebih setelah pelaksanaan Otonomi Khusus tidak banyak dirasakan Papua.



# Pelanggaran Hak Sipil & Politik

---

- Stigma Separatis
- Hak untuk hidup: Puncak Jaya, Perbatasan PNG
- Hak atas rasa aman.
- Hak untuk bebas berserikat & berkumpul
- Hak atas kebebasan berekspresi & berpendapat
- Hak atas kebebasan pers & informasi
- Penyiksaan, impunitas



# Kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Papua

---

- Kasus Wasior-Wamena → masih dipingpong dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.
- Kasus Abepura 2006.
- Kasus penembakan terhadap Opinus Tabuni (2008).
- MIFEE, Perkebunan Kelapa Sawit, Freeport
- Penyiksaan: sweeping OPM, penyiksaan terhadap tahanan, dll.



# Pelanggaran Hak EKOSOB

---

- Hak atas Kesehatan: kematian ibu melahirkan, HIV/AIDS, minuman keras.
- Hak atas Pendidikan: kualitas & kuantitas rendah.
- Hak atas Ekonomi Kerakyatan: marginalisasi, MIFEE, FI, BP, dll.
- Hak atas tempat tinggal dan lingkungan yang layak: penggusuran.
- Human Development Index terendah.
- Budaya & kehidupan sosial terancam punah.



# Dari sisi Papua

---

- Masih ada ganjalan sejarah masuknya Papua ke Indonesia.
- Tidak percaya Pemerintah Pusat.
- Tidak percaya Pejabat Provinsi & Kabupaten.
- Menolak Otsus.
- Menuntut dialog yang bermartabat.
- Menuntut referendum (kel. garis keras).
- Menuntut kebenaran, menolak rekonsiliasi jika para pelaku belum diadili.





# Mengapa Papua menolak OTSUS?

---

- Jakarta dianggap setengah hati karena banyak ketentuan dalam UU Otsus diabaikan, misalnya: pemisahan Papua & Papua Barat dilakukan tanpa persetujuan MRP, lahirnya PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menganggap lambang daerah dan bendera identik dengan kelompok separatis.
- Dana triliunan tidak dirasakan rakyat, malah dinikmati pejabat-pejabat daerah.
- Kesehatan, pendidikan & ekonomi → kemiskinan.
- Impunitas & deployment pasukan, operasi intelejen.



# Pemerintah Pusat terhadap Papua

---

- Pendekatan keamanan.
- Gelontoran dana OTSUS: + 2 triliun/tahun.
- Tidak mendengar suara rakyat: alasan separatis? Terlalu jauh dari Jakarta? Dianggap terbelakang?
- Daerah yang sangat potensial untuk peningkatan ekonomi → investor & imigran.
- Jawanisasi/Indonesianisasi Papua.



# Internasional terhadap Papua

---

- Memantau situasi Papua: pelanggaran HAM, kampanye internasional Papua di luar negeri, pasca Leste & Aceh.
- Kasus-kasus: Militerisasi & Penyiksaan, Filep Karma, Yawan Wayeni, Penyiksaan Puncak Jaya, Referendum vs Dialog, Isolasi Papua, MIFEE, Freeport.
- Tetap dukung Papua dalam NKRI: posisi Indonesia sangat kuat, terutama untuk sekutu war against terror (US), garda terdepan mencegah people smuggling (Aus).
- Investasi di Papua: AS, Inggris, Jepang, Jerman, Australia, Korea, Cina, Singapura.



# Usulan penyelesaian konflik

---

- Tumbuhkan kepercayaan Jakarta-Papua.
- Pemerintah serius mendengar suara rakyat Papua.
- Dialog Jakarta-Papua: evaluasi bersama.
- Penataan kembali pembangunan berdasarkan hasil evaluasi bersama.
- Perlindungan HAM kepada rakyat
- Hukum para pelaku korupsi & pelanggaran HAM.
- Penambahan guru & dokter, bukan aparat keamanan yang represif!